

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- A. Hamzah dan I Dahlan, 1998, *Upaya Hukum dalam Perkara Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.
- Aminuddin dan H. Zainal Asikin, 2005, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Asikin, Zainal, 2015, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia.
- B. Arief Sidharta, 2014, *Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung, FH UNPAR.
- Chazawi A, 2011, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) dalam Perkara Pidana (Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajar, Mukti dan YuliantoAchmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Friedrich, Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia.
- HMA Kuffal, 2017, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM Press.
- HR. Otje Salman S dan Anton F Sutanto, 2005, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Aditama.
- Harahap, M. Yahya, 2008, "Ruang Lingkup Peninjauan Kembali". *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.
- , 2010, "Upaya Hukum Luar Biasa". *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny, 2008, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media.

- Janedjri M. Gaffar, 2009, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Koentjaraningrat, 2007, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Kurnia, Titon Slamet, 2013, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sang Penjaga HAM (The Guardian of Human Rights)*, cetakan ke-1, Bandung: PT Alumni.
- L Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di kejaksanaan & pengadilan negeri upaya hukum & eksekusi)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- L. Tanya, Bernard, 2013, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- L.J. Van Apeldoorn, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Laksono, Fajar dkk, 2013, *Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)/Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- M Effendy, 2012, *Sistem peradilan pidana (Tinjauan terhadap beberapa perkembangan hukum pidana)*. Jakarta: Refferensi.
- M. Gultom, Binsar, 2020, *Pandangan Kritis Seorang Hakim*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- M. Solly Lubis, 2004, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju.
- Mappiasse, Syarif, 2017, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Martitah, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*, cetakan ke-1, Jakarta: Konstitusi Press.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S., & Pitlo, A. 2013, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.

- Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- O. Notohamidjojo, 2012, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen.
- R. Prasetyo, 2010, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) oleh Kejaksaan Agung*, Jakarta, BPHN.
- Ramiyanto, 2016, *Makna "Ahli Waris" sebagai Subjek Pengajuan Peninjauan Kembali*, Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang.
- Rahardjo, Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Syahuri, Taufiqurrohman, 2011, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Tim Pengkaji Pusat Litbang, 2006, *Problematika Penerimaan Peninjauan kembali dan Grasi dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Puslitbang Kejagung RI.
- Yahya, Bettina, 2015, *Laporan Penelitian: Pembatasan Penggunaan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana*, Puslitbang Hukum dan Keadilan, Badan Litbang Diklat Kumdil MA-RI.
- Yukri Asy'ari. Hegrinda Rahmawaty Hilipito dan Mohammad Mahrus Ali, *Model dan Implementasi Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang. Studi Putusan Tahun 2003-2012*. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Zaenuddin Ali, 2017, *Hukum Islam*, Bandung: Sinar Grafika.

Jurnal-jurnal :

- Ariyanto, Yading, 2018, *Hak Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Keadilan Hukum di Indonesia*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.
- Chakim, M. Lutfi, 2015, *Mewujudkan Keadilan melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi*, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni.

- Febriansyah, Ferry Irawan, 2016, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, dalam Jurnal PERSPEKTIF, Volume XXI No. 3, Edisi September.
- Hardy Salim, dkk., 2019, *Keabsahan Putusan Pengadilan yang Belum Inkracht sebagai Novum dalam Pengajuan Peninjauan Kembali*, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (2) Desember.
- Harsanto, Adi dkk., 2017, “*Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*”, dalam Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 3, Maret.
- Laksono, Fajar Soeroso, 2014, *Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 1, Maret.
- Muhlizi, Arfan Faiz, 2015, “*Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Yang Berkeadilan Dan Berkepastian Hukum: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013*”, dalam Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 2 Agustus.
- P.A.F. Lamintang dan C Samosir, 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Bandung: Tarsitio Press.
- Rafsanjani, Akhmed Hassemi, 2020, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 Terhadap Kewenangan Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana*, dalam *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 26, Nomor 5, Februari.
- Shanti Dwi Kartika, 2014, *Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali, Antara Keadilan dan Kepastian Hukum*”, *Buletin Info Hukum Singkat Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI*, Vol. VI, No. 06/II/P3DI/Maret/.
- Sutrisno, 2020, *Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi*, dalam *Gorontalo Law Review*, Vol.3 No.2 Oktober.
- Yayang Susila Sakti, dkk., 2018, *Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum antara Kepastian dan Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Peraturan Perundang-Undangan :

UUD 1945 Amandemen ke-4.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Putusan MA Nomor 55 PK/Pid/1996.

Putusan MA Nomor 3 PK/Pid/2001.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016.

Website :

ASH, "MA: Larangan Jaksa Ajukan PK Mengikat Kejaksanaan", dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57412b95477b5/ma--larangan-jaksa-ajukan-pk-mengikat-kejaksanaan/>.

Devina Halim, "Kejagung Duga Jaksa Pinangki dan Djoko Tjandra Berkonspirasi Terkait Permintaan Fatwa ke MA", <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/27/15085301/kejagung-duga-jaksa-pinangki-dan-djoko-tjandra-berkonspirasi-terkait>.

Dimas Hutomo, *Kekuatan Hukum Putusan Peninjauan Kembali*, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt577648897772e/kekuatan-hukum-putusan-peninjauan-kembali/>.

Erga Omnes Definition, dala <http://www.duhaime.org/LegalDictionary/E/ErgaOmnes.aspx>.

<https://business-law.binus.ac.id/2017/10/31/asas-erga-omnes-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi/>

<https://law.ui.ac.id/v3/mengkaji-implikasi-putusan-mahkamah-konstitusi-ri-nomor-33puu-xiv2016-terkait-hak-jaksa-mengajukan-peninjauan-kembali-dalam-perkara-pidana/>.

<http://artonang.blogspot.com/2016/06/fungsi-pembaharuan-hukum.html>.

Jimly School, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, dalam

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11779>.

Kompas.Com., “Tiga Kasus yang Menjerat Joko Tjandra dalam Sebulan Setelah Ditangkap”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/28/06583231/tiga-kasus-yang-menjerat-djoko-tjandra-dalam-sebulan-setelah-ditangkap?page=all>.

Mahatma C., “Kasus Hukum Joko Tjandra dalam Skandal Bank Bali”, dalam <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kasus-hukum-joko-tjandra-dalam-skandal-bank-bali>.

Media N, *Alasan dan Jangka Waktu Pengajuan Peninjauan Kembali*, <https://media-n.id/alasan-dan-jangka-waktu-pengajuan-peninjauan-kembali/>.

V2C Consultant, *Penjelasan, Syarat dan Cara Penyampaian Peninjauan Kembali*, dalam <https://www.v2cconsultant.com/id/news-detail/penjelasan-syarat-dan-cara--penyampaian-peninjauan-kembali-pk-181>.